

## **Analysis Of The Effect Of Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) On The Welfare Of Low-Income Communities In South Buru District**

### **Analisis Pengaruh Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kabupaten Buru Selatan**

Jacob Paunno<sup>1\*</sup>, Dientje Rumerung<sup>2</sup>, Djufri Rays Pattilouw<sup>3</sup>

Universitas Pattimura, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

[jopypaunno78@gmail.com](mailto:jopypaunno78@gmail.com)<sup>1</sup>

*\*Corresponding Author*

---

#### **ABSTRACT**

*This study aims to see the effect of Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) on the welfare of low-income people. The data used is primary data obtained from a population of 84 beneficiaries of the self-help housing stimulant assistance program. The analysis method used is multiple linear regression. The results showed that food access and self-help housing stimulant assistance had a positive and significant effect on the welfare of low-income people in South Buru Regency.*

**Keywords :** Stimulant, Self-Help, Welfare

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari populasi 84 penerima manfaat program bantuan stimulan perumahan swadaya. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses pangan dan bantuan stimulus perumahan swadaya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Buru Selatan.

**Kata Kunci :** Stimulus, Swadaya, Kesejahteraan

### **1. Pendahuluan**

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat penting dalam mendukung kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Akses terhadap perumahan yang layak tidak hanya memberikan tempat tinggal yang aman dan nyaman, tetapi juga berperan penting dalam membentuk lingkungan sosial yang sehat serta mendukung produktivitas ekonomi. Namun, di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, masalah keterbatasan akses perumahan layak masih menjadi isu krusial, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang seringkali menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan perumahannya karena keterbatasan finansial, akses kredit, serta kemampuan untuk membangun atau memperbaiki hunian secara mandiri (Baidarus et al., 2023).

Berbagai dampak yang dapat ditimbulkannya sangat beragam antara lain tingginya angka backlog, pemukiman kumuh, rumah tidak layak huni, dan lain-lain (Ramadhan et al., 2024). Hal ini masih menjadi tantangan besar di Indonesia dalam bidang pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman. Kendatipun demikian pemerintah terus berusaha mendorong pembangunan perumahan sebagai upaya memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dalam bentuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sesuai amanat amandemen UUD 1945 Pasal 28H ayat (1), "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan". Mandat ini juga sejalan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Langkah implementatif untuk memenuhi amanat Undang-undang akan kebutuhan tempat tinggal dan lingkungan yang layak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Perumahan Swadaya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan memiliki Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan maksud meningkatkan prakarsa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah yang layak huni, sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan (ADINDA, 2021). MBR yang memiliki lahan namun tidak cukup modal untuk membangun rumah yang layak, maka pemerintah membantu untuk mengatasi kendala finansial dalam mengakses perumahan (Mangeswuri, 2016).

Pada implementasinya penanganan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman cukup kompleks dan tidak bisa dilakukan sendiri oleh dinas teknis yang bertanggung jawab saja, tetapi harus melibatkan sektor lain yang terkait. Beberapa kasus ditemukan program BSPS tidak mencapai hasil yang maksimal (Zulkarnain, 2016). Bahkan diperlukan fasilitator lapangan untuk membantu implimentasi program ini (Annisa, 2021). Koordinasi yang intensif antar sector bahkan antar stakeholder termasuk masyarakat sekitar diperlukan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan rumah layak huni dan terjangkau di permukiman yang aman, sehat, dan berkelanjutan serta terpenuhi akses layanan air minum dan sanitasi serta utilitas lainnya (Sekarvilia & Karsinah, 2020).

Dalam upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah yang layak di Indonesia, pemerintah pusat pun memberikan wewenang dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk ikut serta dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tempat tinggal di daerahnya. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengamanatkan bahwa pembangunan perumahan merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah. Perumahan dan permukiman merupakan urusan bersama yang harus ditangani oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Perumahan dan Permukiman menjadi urusan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

Kabupaten Buru Selatan sampai dengan tahun 2023 memiliki jumlah penduduk sebanyak 79.017 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 39.952 dan perempuan sebanyak 39.065 jiwa. Berdasarkan status perkawinan, maka sebanyak 53,97% sudah kawin, 38,6% belum kawin dan 7,43% status bercerai. Jumlah tersebut yang memiliki rumah hanya sebanyak 10,99% sedangkan sisanya sebanyak 89,01% masih menempati rumah kontrak/sewa, rumah bebas sewa, rumah dinas, rumah adat dan lainnta (BPS Buru Selatan, 2024).

Kajian tentang program BSPS yang pernah dilakukan di berbagai daerah seperti terlihat dari kajian Hapsari (2016) menunjukkan bahwa masih rendahnya ketepatan sasaran termasuk kondisi fisik perumahan, terjadi peningkatan kondisi sosial akan tetapi terjadi penurunan kondisi ekonomi karena banyak masyarakat yang harus berutang dalam memperbaiki rumahnya. (Sudarta, 2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa belum memberikan harapan yang optimal karena masih terdapat beberapa faktor yang harus diperbaiki seperti kepemilikan tanah dan kondisi fisik rumah.

(Amelia & Guswandi, 2019) menemukan bahwa program BSPS untuk masyarakat kelas menengah di beberapa provinsi di Indoneisa seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Papua dan Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat dapat menurunkan kemiskinan dengan peningkatan kualitas perumahan, namun belum dapat menurunkan masyarakat yang tidak memiliki rumah (backlog). Sedangkan Kajian dari (Arnawa & Karmini, 2020) di Bali dan (Indayani & Sadriah, 2020) di Sulawesi Barat. Kesimpulannya adalah program bantuan perumahan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di kedua daerah tersebut.

Kabupaten Buru Selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam penyediaan perumahan layak bagi masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR). Banyak masyarakat di daerah ini yang tinggal di rumah tidak layak huni, dengan kondisi bangunan yang kurang memadai, akses terbatas terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, dan sanitasi yang layak. Kondisi geografis yang sulit serta keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi juga semakin memperburuk situasi perumahan di wilayah tersebut.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Buru Selatan.

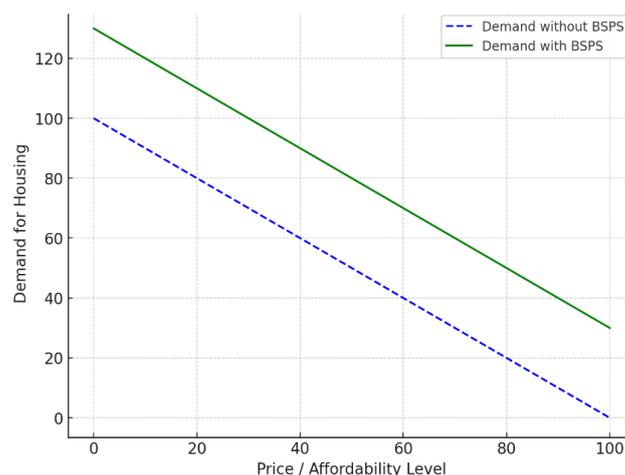
## 2. Tinjauan Pustaka

### Teori Permintaan Perumahan

Kompetensi intelektual menurut beberapa ahli memiliki pengertian yang menekankan pada kem Prilaku konsumen menjadi kunci dalam memahami akses perumahan. Konsumen, dalam hal ini MBR, memiliki preferensi yang berbeda-beda terkait dengan kualitas rumah yang diinginkan. Keputusannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pendapatan, harga, dan kebijakan pemerintah. Program BSPS yang memberikan bantuan kepada MBR diharapkan dapat memengaruhi keputusannya untuk membeli atau membangun rumah, sehingga meningkatkan kualitas hidupnya.

Fungsi permintaan menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Dalam konteks perumahan, jika program BSPS menurunkan biaya pembangunan rumah melalui bantuan finansial, permintaan akan perumahan layak huni di kalangan MBR cenderung meningkat.

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, akses terhadap perumahan sering kali dibatasi oleh kemampuan finansial. Permintaan terhadap perumahan dari kelompok ini sangat dipengaruhi oleh Pendapatan yaitu pendapatan yang rendah mengurangi kemampuannya untuk membeli atau menyewa rumah. Selanjutnya adalah Harga yang tinggi akan mengurangi jumlah perumahan yang dapat diakses dan adanya Program Bantuan seperti BSPS memberikan dukungan finansial yang dapat mengurangi biaya perumahan, sehingga meningkatkan permintaan dan daya beli. Secara sederhana dapat diperhatikan pada gambar 1 di bawah ini.



**Gambar 1. Kurva Permintaan BSPS Dalam Meningkatkan Akses Perumahan**

Gambar tersebut memperlihatkan kurve permintaan putus-putus berwarna biru adalah permintaan perumahan tanpa adanya BSPS. Seiring dengan meningkatnya harga rumah atau tingkat keterjangkauan yang menurun, permintaan akan perumahan juga menurun. Sementara kurve berwarna hijau merupakan permintaan dengan adanya bantuan BSPS. Menunjukkan peningkatan permintaan perumahan dengan adanya BSPS, yang menggeser kurva permintaan ke atas. Program ini menurunkan biaya yang efektif bagi MBR, sehingga

meningkatkan permintaan terhadap perumahan pada harga yang lebih terjangkau. Kurva ini mengilustrasikan bahwa bantuan seperti BSPS dapat meningkatkan permintaan perumahan, dengan cara mengurangi hambatan finansial bagi MBR

### **Teori Kesejahteraan**

Theory Kesejahteraan yaitu Welfare State menurut Bentham (1748-1832), mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens. Bentham menggunakan istilah "utility" (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk (Sukmana, 2016).

Menurut BAPPENAS: Kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. (Bappenas-Indonesia, diakses Jumat, 29 November 2024) Pada akhirnya, Perbincangan mengenai kesejahteraan sosial akan mengerucut pada dua poin utama, yaitu (1) apa yang didapatkan individu dari masyarakatnya, dan (2) seberapa jauh kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi (Azizy, 2015).

Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yakni classical utilitarian, neoclassical welfare theory dan new contractarian approach (Albert dan Hahnel, 2005: dalam (Sastrawan et al., 2024).

- a. Pendekatan classical utilitarian menekankan bahwa kesenangan atau kepuasan seseorang dapat diukur dan bertambah. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya, sedangkan bagi masyarakat peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya.
- b. Pendekatan neoclassical welfare theory menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu.
- c. Perkembangan lainnya dalam teori kesejahteraan sosial adalah munculnya new contractarian approach yang mengangkat adanya kebebasan maksimum dalam hidup individu atau seseorang. Hal yang paling ditekankan dalam pendekatan new contractarian approach ini adalah individu akan memaksimalkan kebebasannya untuk mengejar konsep mereka tentang barang dan jasa tanpa adanya campur tangan.

Untuk melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indicator yang dapat dijadikan sebagai ukuran antara lain:

- a. Tingkat pendapatan keluarga.
- b. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non pangan.
- c. Tingkat Pendidikan keluarga.
- d. Tingkat Kesehatan keluarga.
- e. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitasnya, memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur. Indikator kesejahteraan suatu daerah diukur melalui tingkat kemiskinan, angka buta huruf, angka melek huruf, emisi gas CO<sub>2</sub>, kerusakan alam dan lingkungan, polusi air dan tingkat produk domestik bruto (PDB) (Thomas, 2005, dalam (Sari & Pratiwi, 2018)). Kesejahteraan suatu wilayah juga ditentukan dari ketersediaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia (H), sumber daya fisik (K) dan sumber daya lain (R). Ketiga sumber daya tersebut berinteraksi dalam proses pembangunan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Pendapatan orang kaya (golongan menengah ke atas) akan digunakan untuk dibelanjakan pada barang mewah, emas, perhiasan, rumah yang mahal. Golongan menengah

ke bawah yang memiliki karakteristik miskin, kesehatan, gizi dan pendidikan yang rendah, peningkatan pendapatan dapat meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan. Hingga saat ini, dikenal tiga bentuk model penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu residual welfare state yang memberikan pemerintah lebih sedikit kesempatan dalam intervensi publik sehingga sangat membuka pintu untuk swastanisasi, model institusional/ universalist welfare state yang menekankan negara untuk memberikan pelayanan public yang maksimal dan komprehensif, dan social insurance welfare yang berupaya menempatkan social welfare (campur tangan negara dalam urusan kesejahteraan sosial) sebagai alat untuk meningkatkan produktifitas kelompok masyarakat penerima layanan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang.

Secara umum kesejahteraan ini dispesifikasi dan disederhanakan menjadi fungsi produksi kesejahteraan  $W$  (welfare) dengan persamaan berikut:  $W = W(Y, I, P)$ , di mana  $Y$  = pendapatan perkapita,  $I$  = ketimpangan dan  $P$  = Kemiskinan absolut

Berkaitan dengan fungsi persamaan di atas, diasumsikan bahwa kesejahteraan sosial berhubungan positif dengan pendapatan per kapita, namun berhubungan negatif dengan kemiskinan absolut dan tingkat ketimpangan. Teori ekonomi kesejahteraan mempelajari berbagai kondisi di mana cara penyelesaian dari model equilibrium umum dapat dikatakan antara lain alokasi optimal faktor produksi di antara konsumen (Gaspers, 1996).

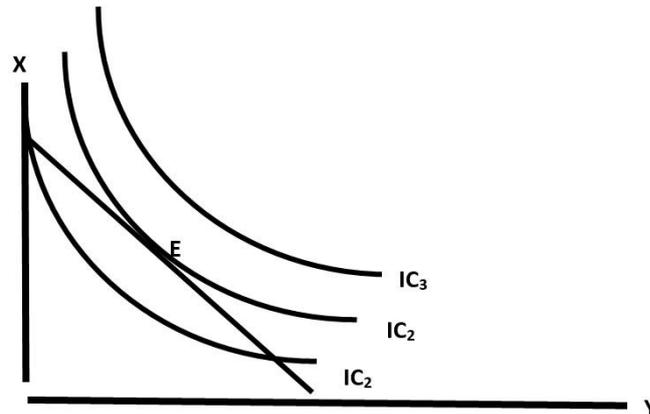
Ketiga variable ini mempunyai signifikansi yang berbeda, dan harus dipertimbangkan secara menyeluruh untuk menilai kesejahteraan negara berkembang. Berkaitan dengan fungsi persamaan kesejahteraan diatas, diasumsikan bahwa kesejahteraan sosial berhubungan positif dengan pendapatan perkapita, namun berhubungan negative dengan kemiskinan (Bintarto, 1983). Badan Pusat Statistik mengukur kesejahteraan sebagai berikut:

- a. Pendapatan. adalah indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud pendapatan adalah total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun). Pendapatan terdiri dari penghasilan atas tenaga kerja, penghasilan atas mlik seperti (sewa, bunga dan deviden) serta pinjaman dari pemerintah.
- b. Perumahan dan pemukiman, selain sebagai kebutuhan manusia juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam peranannya sebagai pusat peristirahatan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Selain itu rumah merupakan determinan kesehatan masyarakat, dimana rumah yang nyaman dan sehat adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan hidup tiap penghuninya.
- c. Kesehatan, merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus merupakan indikator keberhasilan dalam pembangunan. Masyarakat yang sakit maka akan sulit untuk mempertahankan kesejahteraan bagi dirinya sendiri. Sehingga pembangunan dan berbagai upaya dibidang Kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan dapat dilihat melalui mampu tidaknya masyarakat menjalani kesehatan serta mampu untuk membiayai secara penuh obat yang dibutuhkan.
- d. Pendidikan, merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan lokasi geografis.

Dalam teori ekonomi dikenal teori Pareto yang menjelaskan tentang tiga jenis tingkatan kesejahteraan, yaitu pertama pareto non optimal yaitu terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang atau kelompok pasti akan mengurangi kesejahteraan orang atau kelompok lain. Kedua, pareto optimal yaitu terjadinya kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan orang lain. Ketiga, pareto superior yaitu terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan tertinggi dari orang lain.

Menurut teori pareto tersebut, ketika kondisi kesejahteraan masyarakat sudah mencapai pada kondisi pareto optimal maka tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan.

Kesejahteraan dapat juga dijelaskan melalui pendekatan kurve indifren, yang menjelaskan bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat diterangkan jika terpenuhinya semua kebutuhan hidupnya. Artinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya diperlukan pendapatan yang memadai sehingga kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Hal ini dapat dijelaskan pada gambar 2 di bawah ini



**Gambar 2. Kurva Indeferen Sosial (Fungsi Kesejahteraan Sosial)**

Gambar 2 menjelaskan bahwa IC1, IC2 dan IC3 adalah fungsi kesejahteraan sosial atau kurva indeferen sosial dari peta kesejahteraan masyarakat. Seluruh titik pada kurva tertentu memberikan tingkat kepuasan atau kesejahteraan yang sama. Masyarakat lebih menyukai titik pada fungsi kesejahteraan sosial yang lebih tinggi dan bukan pada fungsi kesejahteraan yang lebih rendah. Kesejahteraan maksimal dapat dicapai pada titik E yaitu pada saat fungsi kesejahteraan berpotongan dengan kemampuan daya belinya atau ketersediaan pendapatannya.

Jika dikaitkan dengan BSPS, efisiensi Pareto relevan untuk menilai apakah program ini berhasil meningkatkan kesejahteraan MBR tanpa merugikan kelompok lain. Jika program BSPS berhasil meningkatkan akses perumahan bagi MBR tanpa mengurangi kesejahteraan kelompok lain atau menimbulkan beban ekonomi yang besar bagi pemerintah, maka program ini dapat dikatakan efisien secara Pareto. Namun, jika program ini menyebabkan pengalihan sumber daya yang tidak adil atau mempengaruhi anggaran negara secara signifikan tanpa memberikan manfaat jangka panjang, maka program tersebut mungkin tidak efisien.

Intervensi pemerintah melalui program BSPS dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses terhadap perumahan yang aman, layak, dan terjangkau. Selain itu, intervensi ini juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam distribusi sumber daya, sehingga MBR tidak tertinggal dalam akses terhadap salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu perumahan.

### 3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini bersifat eksplanatif untuk menerangkan persepsi masyarakat berpenghasilan rendah yang sudah mendapat bantuan program bantuan stimulan perumahan swadaya. Sejak tahun 2021 sampai 2022 terdapat 84 orang. Jumlah tersebut semuanya dijadikan sebagai responden sampel. Data dan informasi dikumpulkan dengan menggunakan daftar kuesioner. Jawaban responden diklasifikasi dengan menggunakan pengukuran skala likert, yaitu mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau

fenomena tertentu. Untuk skor yang dapat diberikan atas kategori dengan peringkatnya adalah

- a. Sangat setuju (SS) = 5
- b. Setuju (S) = 4
- c. Kurang setuju (K) = 3
- d. Tidak setuju (TS) = 2
- e. Sangat tidak setuju (STS) = 1

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan dua cara yaitu:

1. Analisis Kualitatif, yaitu bentuk analisis yang mendeskripsikan data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan klasifikasi skala likert dan memberikan penafsiran serta menarik kesimpulan dari data dan informasi tersebut.
2. Analisis Kuantitatif, yaitu analisis dengan menggunakan metode kuantitatif berupa metode statistik yaitu metode regresi linear berganda dengan persamaan umum:  $Y = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \mu$ , dimana  $Y$  = tingkat kesejahteraan,  $X_1$  = akses pangan dan  $X_2$  = program bantuan stimulan perumahan swadaya, sedangkan  $\alpha_0$ ,  $\alpha_1$  dan  $\alpha_2$  = parameter yang akan dicari nilainya serta  $\mu$  = standar error.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian berdasarkan olah data ditunjukkan pada tabel 1 di bawah ini

**Tabel 1. Hasil Olah Data Pengaruh Akses Pangan dan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Buru Selatan**

Dependent Variable: Y1				
Method: Least Squares				
Date: 05/23/25 Time: 07:25				
Sample: 1 84				
Included observations: 84				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	0.435209	0.120558	3.609957	0.0005
X2	0.486756	0.125128	3.890064	0.0002
C	0.440930	0.700988	0.629013	0.5311
R-squared	0.925496	Mean dependent var		22.32143
Adjusted R-squared	0.923656	S.D. dependent var		2.179647
S.E. of regression	0.602245	Akaike info criterion		1.858755
Sum squared resid	29.37860	Schwarz criterion		1.945570
Log likelihood	-75.06772	Hannan-Quinn criter.		1.893654
F-statistic	503.0936	Durbin-Watson stat		2.147569
Prob(F-statistic)	0.000000			

Tabel tersebut dapat ditulis kembali menjadi  $Y + 0,4449 + 0,435X_1 + 0,487X_2$  yang ditafsirkan secara ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Koefisien akses pangan sebesar 0,435 dengan arah positif, artinya pengaruh akses pangan terhadap tingkat kesejahteraan bersifat positif sehingga jika terjadi peningkatan akses pangan sebesar 1 tingkatan maka akan menaikkan tingkat kesejahteraan sebesar 0,435 tingkatan, dengan anggapan variabel lainnya dianggap tetap. Penelitian ini menemukan bahwa semakin besar akses pangan, maka tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah semakin meningkat. Ini dapat disebabkan oleh karena dengan

ketersediaan rumah yang layak huni, maka masyarakat dapat mengurangi biaya hidupnya dari komponen perumahan. Dengan demikian masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya terutama pangan. Akses pangan terutama berkaitan dengan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Ketersediaan pangan dapat berupa hasil panen sendiri dan diperoleh dengan membeli di pasar.

Ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang berpenghasilan rendah sangat besar pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut, karena merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda dan dialihkan, sebagaimana teori Maslow. Kebutuhan ini mendesak untuk harus terpenuhi. Kaitannya dengan kepemilikan rumah adalah, masyarakat sudah menyisihkan sebagian pendapatannya untuk pengadaan pangan karena tidak lagi ada komponen pengeluaran untuk perumahan baik untuk perbaikan ataupun biaya operasional lainnya. Pada gilirannya tingkat kesejahteraan masyarakat lebih meningkat. Ketersediaan pangan yang baik dapat meningkatkan gizi dan stabilitas sosial masyarakat.

Beberapa dampak positif dari ketersediaan pangan yaitu:

1. Peningkatan kesehatan dan gizi yang bisa memperbaiki kondisi stunting, malnutrisi terutama pada anak-anak dan ibu hamil.
2. Stabilitas sosial dan ekonomi.
3. Peningkatan kualitas hidup dalam bentuk peningkatan produktivitas kerja, kemampuan belajar dan kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan sosial.
4. Mengurangi angka kemiskinan, karena ukuran kemiskinan biasanya dengan menggunakan konsumsi kalori dalam satuan waktu tertentu.

Penelitian ini sama dengan kajian dari (Saiful, 2024) yang menemukan bahwa ketahanan pangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Demikian juga dengan (Tajerin et al., 2017), menemukan bahwa ketahanan pangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat miskin.

2. Koefisien program BSPS sebesar 0,487 dengan arah positif, artinya pengaruh program BSPS terhadap tingkat kesejahteraan bersifat positif sehingga jika terjadi peningkatan program BSPS sebesar 1 tingkatan, maka akan meningkatkan tingkat kesejahteraan sebesar 0,487 tingkatan, dengan anggapan variabel lainnya dianggap tetap. Adanya kepemilikan rumah masyarakat dapat melakukan aktifitas ekonomi yang dapat meningkatkan tingkat kesejahtraannya. Ada dua bentuk pelaksanaan program ini yaitu membangun rumah baru yang diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki lahan dan rehabilitasi rumah yang sudah ada tetapi tidak dianggap layak huni. Tentu pemberian bantuan ini terdapat sejumlah syarat-syarat tertentu yang harus dipengaruhi.

Bangunan yang direnovasi kadang-kadang ada masyarakat yang sudah memiliki unit usaha, namun dengan kondisi rumah yang tidak layak huni membuat usaha tersebut tidak bisa berkembang dengan baik, Tetapi dengan adanya rumah yang layak, maka dapat meningkatkan atau mengembangkan usahanya yang berdampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi penerima bantuan, dengan meningkatkan kualitas hunian dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Program ini berhasil meringankan beban finansial keluarga, mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan perumahan, dan memperbaiki hubungan sosial di masyarakat. Selain itu, peningkatan kondisi hunian turut mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan bagi para penerima manfaat. Program ini sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam kepemilikan rumah. Contoh rumah yang dibangun baru seperti pada beberapa gambar di bawah ini.



**Gambar 3. Contoh Rumah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya**

Gambar di atas menunjukkan bahwa pada dua gambar yang paling atas merupakan bangunan rumah yang baru, sedangkan gambar di bawah adalah bangunan rumah yang merupakan hasil renovasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya program ini masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah semakin terbuka lebar akses untuk memiliki rumah. Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2022, jumlah rumah yang sudah dibangun baik yang baru ataupun yang direnovasi adalah sebanyak 3523 unit yang tersebar ke berbagai kecamatan.

## 5. Penutup

### Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa akses pangan yang semakin terbuka serta dengan adanya program bantuan stimulan perumahan swadaya dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Disarankan agar program ini dapat berlanjut terus yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

### Daftar Pustaka

- ADINDA, N. F. S. (2021). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DESA WISATA AGROWIDYA SINAR HARAPAN RAJABASA BANDAR LAMPUNG*. repository.radenintan.ac.id. <http://repository.radenintan.ac.id/15555/>
- Amelia, S., & Guswandi, G. (2019). The stimulant assistance program of self-help housing in attempts to improve the living quality of middle-class in Indonesia. *International Journal of Humanities and Social Science*, 24, 55–64.
- Annisa, N. N. (2021). The Impact of Work Stress on the Performance of Field Facilitators Staff of Self-Help Housing Stimulant Assistance Program in Magelang with Job Satisfaction as Mediation. *The 3rd International Conference on Banking, Accounting, Management and Economics (ICOBAME 2020)*, 323–327.
- Arnawa, I. G. W. K., & Karmini, N. L. (2020). Analisis Dampak Program Bedah Rumah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Tejakula

- Buleleng. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 9(12), 2618–2644.
- Azizy, S. H. (2015). Mendudukan Kembali Makna Kesejahteraan dalam Islam. *Ponorogo: CIOS*.
- Baidarus, M., Febriano, D., Mubarak, D. A., & Ramadhani, M. A. (2023). Kajian Sistematis Kebijakan Skema Pembiayaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Pada Sektor Perumahan Guna Mengatasi Backlog Di Indonesia. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 16(1), 1–13.
- Bintarto, R. (1983). Interaksi desa-kota dan permasalahannya. (*No Title*).
- Gaspers, V. (1996). *Ekonomi Manajerial*. Gramedia Pustaka Utama.
- Indayani, B., & Sadriah, S. (2020). Pengaruh efektivitas program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) terhadap pengentasan kemiskinan. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 2(2), 103–116.
- Mangeswuri, D. R. (2016). Kebijakan Pembiayaan Perumahan Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(1), 83–95.
- Ramadhan, S., Murti, R. P. W., & Kustiwan, I. (2024). INFORMAL CITY: PARADIGMA BARU MENUJU KOTA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN. *SPACE*, 11(2).
- Saiful, N. A. Q. (2024). Ketahanan Pangan dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Di Kabupaten Jeneponto. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 11729–11742.
- Sari, M. E. P., & Pratiwi, D. A. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 137–152.
- Sastrawan, B., Samsi, A., & Seran, G. G. (2024). Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Masyarakat. *Karimah Tauhid*, 3(1), 473–479.
- Sekarvilia, M., & Karsinah, K. (2020). Implementation of Swadaya Housing Stimulant Assistance. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 3(1), 650–669.
- Sudarta, R. D. (2018). The Effectiveness of Self-Supporting Housing Stimulant Assistance Program on Feasibility of Low-Income People House in Daerah Istimewa Yogyakarta. *Int. J. Eng. Res*, 7(10), 256–266.
- Sukmana, O. (2016). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Sospol*, 2(1), 103–122.
- Tajerin, T., Sastrawidjaja, S., & Yusuf, R. (2017). Tingkat kesejahteraan dan ketahanan pangan rumah tangga nelayan miskin: Studi kasus di Kelurahan Marunda Baru, DKI Jakarta dan Desa Tanjung Pasir, Banten. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 6(1), 83–102.
- Zulkarnain, Z. (2016). *Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Parigi Selatan*. Tadulako University.